

KESEPAKATAN SISTEM GANDA NASIONAL PADA PENDIDIKAN KEJURUAN

PURNOMO SETIADY AKBAR
IKIP Medan

ABSTRACT. *Two concepts concerning the dual system, namely that of Depdikbud and that of Depnaker, have their similarities and dissimilarities. Based on these concepts it is essential to redefine the interpretation of the dual system in order to differentiate the meaning of the national dual system and the apprenticeship system. The essence of the dissimilarity is in the certification. In reference to this it is deemed necessary to form a body to organize certification. Through this body a regulation on the dual system and apprenticeship is able to be realized.*

Pendahuluan

Pada sektor Pendidikan, PELITA VI merupakan era kebangkitan Pendidikan Kejuruan. Momentum itu tampak dari besarnya perhatian Depdikbud, Depnaker dan Departemen Perindustrian yang bekerjasama untuk memperhatikannya. Rasa kebersamaan ini dilatarbelakangi oleh tanggungjawab untuk, secara bergandeng tangan, berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan kejuruan. Tentunya kebutuhan SDM yang berkaitan dengan tenaga terampil tingkat menengah sangat diperlukan pada era industrialisasi mendatang. Ketetapan upaya ini sangat sepadan, sehingga upaya Depdikbud tersebut memperoleh tanggapan yang positif dari berbagai pihak.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, kini Depdikbud sangat giat menggalang kerjasama dengan berbagai pihak industri dalam melaksanakan sistem ganda dan magang. Secara konseptual kehandalan kedua sistem dimaksud tidak

perlu diragukan lagi. Konsep ini telah diterapkan oleh Depnaker dan BKKB Jayagiri sejak dua Pelita yang lalu dengan hasil yang menggembirakan.

Pengalaman beberapa negara maju yang telah melaksanakannya, seperti Jerman, Swiss, Jepang, dan Amerika Serikat, yang memakai istilah *dual system dan cooperative education*, dapat merupakan bukti empirik dari kehandalan sistem ganda dan magang. Sekitar satu abad yang lalu, Jerman, Belanda, dan Indonesia sudah pernah melaksanakan pola tersebut. Pada zaman itu, lulusan sekolah kejuruan melakukan magang sebagai *leerling* sebelum mereka di-*benoem*.

Di awal Pelita Dua, pada saat pendidikan kejuruan kita mendirikan 10 STM Pembangunan, kita juga telah melaksanakan sistem magang dengan mengirim peserta didik ke industri selama satu semester, yaitu pada semester ketujuh.

Namun, setelah mempelajari dokumen dan konsep yang ada dari Depdikbud dan Depnaker, maka ditemukan beberapa persamaan dan juga perbedaannya. Yang menjadi pekerjaan suci bagi para konseptor pendidikan kejuruan di negara kita adalah apakah sistem ganda tidak dapat dirumuskan melalui suatu kesepakatan nasional. Kesepakatan ini dapat dijadikan pedoman tunggal dalam pengembangan dan pembinaan tenaga kerja kejuruan pada era industrialisasi sebagai awal dari kebangkitan nasional kedua. Bagaimana rupa konsep dimaksud akan diuraikan berikut ini.

Konsep Depdikbud

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Menengah Kejuruan (Dikmenjur), dalam merealisasikan kegiatannya selalu berpedoman kepada Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10 ayat (1), PP No. 29 tahun 1990 Bab XI pasal 29 ayat (1), PP No. 39 tahun 1992, Kepmendikbud No. 0490/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan pedoman-tersebut akhirnya, pada sekitar pertengahan Maret 1994, lahirlah pedoman Sistem Ganda pada Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia. Pedoman ini dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pengertian yang diuraikan pada pedoman ini menyatakan bahwa "sistem ganda" adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja serta terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Pengertian ini memayungi ruang lingkup karakteristik sistem ganda yang terdiri atas (1) standar profesi, (2). standar pendidikan dan pelatihan, (3) kerjasama dengan dunia usaha dan industri, (4) pengujian dan sertifikasi, (5) peraturan pendukung, (6) nilai tambah bagi industri, perusahaan, sekolah, dan peserta didik, (7) insentif, dan (8) kelembagaan. Kedelapan karakteristik ini tentunya merupakan pemaknaan lanjut dari Kepmendikbud No. 0490/U/1992 Bab IV pasal 32 ayat (2) yang memberi pedoman tujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja.

Kerjasama ini meliputi kegiatan (1) saling memberi informasi tentang kebutuhan dan tersedianya tenaga kerja, (2) saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak, (3) tukar menukar kesempatan untuk melahirkan kemampuan staf, (4) kerjasama unit produksi dan promosi, (5) pengalaman kerja lapangan bagi peserta didik dan magang bagi guru, (6) evaluasi kurikulum dan hasil belajar, (7) sertifikasi keahlian, dan (8) kerjasama penempatan dan penelusuran tamatan.

Dari kedua uraian tentang ruang lingkup karakteristik sistem ganda dan kegiatan kerjasama di atas, dapat kita analisis bahwa di samping saling melengkapi juga terdapat tumpang tindih, apabila masing-masing diambil sebagai pedoman pelaksanaan tersendiri. Tentunya tumpang tindih dimaksud masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, sehingga dapat dirinci pedoman untuk sistem yang lebih jelas. Hal ini akan berguna untuk penentuan pilihan pola penyelenggaraan pengajaran sebagaimana diuraikan pada Kepmendikbud No. 080/U/1993, Bab IV butir C.1.

Konsep Depnaker

Setelah mencoba penerapan sistem pemagangan selama ini, pada bulan Januari 1994, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) menerbitkan buku pedoman Pemagangan. Pedoman dimaksud merumuskan bahwa Sistem Pemagangan adalah suatu proses pendidikan dan latihan yang secara sistematis dan terorganisasi dilakukan secara terpadu dan berjenjang di lembaga pendidikan atau latihan dan dengan bekerja secara langsung dalam proses produksi atau jasa di perusahaan, agar peserta memiliki keterampilan dan kompetensi bagi suatu profesi tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha tempat peserta pemagangan dan dunia usaha terkait dalam bentuk pemagangan.

Tujuan pemagangan dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan produktif dengan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pelaksanaan dan pengembangan pelatihan sehingga tujuan dan sasaran pemagangan dapat

(1) meningkatkan kualitas angkatan kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor, (2) peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan dan pengembangan program pelatihan kerja, (3) peningkatan peluang penciptaan kesempatan kerja, (4) peningkatan efisiensi dan keefektifan penyiapan dan pengadaan tenaga kerja terampil dan kompeten.

Pada Departemen Tenaga Kerja, alternatif penerapan latihan pemagangan dapat dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Industri atau di Sekolah Kejuruan dengan tambahan latihan industri. Di Sekolah Kejuruan, bobot pelajaran teori adalah 20 persen, latihan praktek di unit latihan kerja atau BLK adalah 25 persen, dan bekerja di perusahaan adalah 55 persen.

Pemagangan dilaksanakan setelah dilakukan kontrak pemagangan dengan kriteria yang jelas dan dengan kualifikasi pencapaian yang jelas pula. Kejelasan ketiga komponen ini berperan untuk menentukan aspek evaluasi uji keterampilan dan sertifikasi. Jenjang sertifikasi dan ujian yang dilakukan terdiri: atas (1) sertifikasi perusahaan untuk tingkat dasar, (2) uji keterampilan nasional kelas tiga untuk tingkat menengah, (3) uji keterampilan nasional kelas dua untuk lanjutan, dan (4) uji keterampilan kelas satu untuk tingkat manajerial.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan. Melalui dua konsep, apabila dibandingkan di antara delapan butir karakteristik sistem ganda dengan empat butir tujuan dan sasaran pemagangan Depnaker, maka tidak ada perbedaan yang prinsipil di antara Depdikbud dan Depnaker. Perbedaan yang ada hanya dalam redaksional.

Perbedaan. Perbedaan yang terjadi adalah pada jenjang sertifikasi karena sertifikasi pada Depnaker mempunyai jenjang yang jelas secara nasional untuk masing-masing bidang profesi sedangkan ujian keterampilan profesi dan sertifikasi pada sistem ganda dan magang Depdikbud dikoordinasi oleh Majelis Sekolah dengan memperhatikan sistem penilaian sekolah dan sistem penilaian industri.

Dengan demikian, dari jenjang sertifikasi pada Depnaker, ada manfaat yang dapat menjadi acuan Depdikbud untuk dijadikan kesepakatan nasional. Acuan dimaksud adalah (1) sertifikasi perusahaan untuk tingkat dasar untuk dijadikan standar bagi sertifikasi jenjang Pendidikan Luar Sekolah dan SLTP Keterampilan, (2) uji keterampilan kelas tiga untuk tingkat menengah yang dapat dijadikan standar bagi penilaian untuk Sekolah Menengah Kejuruan, (3) uji keterampilan nasional kelas dua untuk dijadikan standar bagi pendidikan setara akademik atau diploma dua sampai tiga, (4) uji keterampilan nasional kelas satu untuk dijadikan standar bagi penilaian keterampilan setara diploma empat

dan sarjana teknik dari perguruan tinggi.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan Slamet Rahardjo dalam disertasinya di Program Pascasarjana IKIP Bandung pada tahun 1992, dijelaskan bahwa apabila magang dapat dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam sistem itu akan terdapat bagian berbentuk subsistem. Di luar subsistem itu sendiri akan terdapat lingkungan sistem yang dapat mempengaruhi kegiatan sistem dimaksud. Dalam lingkungan sistem itu terdapat pula unsur, faktor, dan sistem lain lagi. Unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga, secara keseluruhan, diharapkan akan dapat terlihat adanya mekanisme tertentu yang ditimbulkan oleh kegiatan dominasi unsur tertentu.

Dari hasil rumusan ini, akhirnya Slamet Rahardjo mengatakan bahwa magang merupakan proses bekerja sambil belajar. Pada magang, seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan cara melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil di dalam pekerjaan itu.

Di dalam *Dictionary of Education* ditegaskan bahwa *apprenticeship* (magang) itu merupakan: *the period during which a young person works under the direction of an experienced, well qualified adult to acquire increased skill and knowledge needed for competent performance in a given occupation* (Carter V Good, 1979). Dari batasan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa magang adalah upaya seseorang untuk bekerja di bawah bimbingan orang yang sudah berpengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

Istilah "bekerja" dalam batasan di atas dapat diartikan sebagai suatu pengabdian, baik dengan atau tanpa, menerima upah. Yang penting di sini adalah selama dalam proses pemagangan, pemagang harus berani mengabdikan pada dunia usaha dan industri. Seperti dinyatakan oleh Roy W Robert: *The journeyman usually lived in the master's house and received a fixed wage for works. The journeyman, after several years of experience, was eligible to try for the title of master by performing a piece of work known as a master piece. The master workman, if he so desired, could establish his own shop, employ journeyman and train apprentices* (Roy W Robert, dalam buku *Vocational and Practical Arts Education*, 1987).

Pemagang biasanya tinggal di rumah pemagang dan menerima upah untuk pekerjaannya. Setelah beberapa tahun, pemagang memperoleh seperangkat pengalaman, mampu melakukan perbuatan seperti yang biasa dilakukan

oleh pemagang. Bahkan pemagang, bila menghendakinya dapat mempercayakan tanggungjawab pekerjaannya kepada pemagang, termasuk bertindak sebagai pemagang untuk menangani pemagang baru yang lain. Dengan demikian magang itu merupakan proses kegiatan belajar tempat seseorang berusaha untuk memperoleh dan menguasai suatu keterampilan dengan jalan melibatkan diri secara langsung dalam pekerjaan, dengan atau tanpa, bimbingan dari orang lain yang sudah terampil dalam pekerjaan tersebut (BPKB Jayagiri, 1990). Jadi di sini pemagang boleh langsung terjun dalam pekerjaan tanpa harus menguasai teorinya terlebih dahulu. Sambil bekerja ia memperoleh sejumlah pengalaman, dan sambil bekerja juga ia akan belajar dari pengalaman itu, baik pengalaman yang bersifat teknis maupun pengalaman yang bersifat psikis atau mental.

Dengan demikian magang merupakan kegiatan belajar yang sedikit teori, banyak praktek, sederhana, relatif mudah untuk dilakukan, dapat dikuasai, serta segera dapat dimanfaatkan untuk mencari ataupun menciptakan proses pendidikan keahlian profesi yang erat hubungannya dengan program penguasaan keahlian dunia kerja. Berdasarkan hasil penelitian Samani M, dkk., keadaan di daerah industri di Indonesia tampaknya tidak jauh berbeda dengan sistem pemagangan ini. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah.

Meskipun jumlah industri yang ada cukup banyak, tetapi jumlah peserta didik sekolah kejuruan yang melaksanakan praktek industri juga sangat pesat. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1992 menunjukkan bahwa lebih dari 70% STM tidak dapat melaksanakan praktek industri dengan baik. Meskipun menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi kepala sekolah, guru, dan peserta didik memberikan alasan yang sama sehingga peserta didik melakukan praktek industri di tempat "seadanya" yaitu akibat kesulitan mendapatkan industri atau dunia usaha seperti yang diharapkan. Dari wawancara staf pimpinan pada tiga BUMN besar di Surabaya diperoleh gambaran bahwa BUMN yang termasuk besar tersebut hanya mampu menerima 15 sampai 20 orang peserta didik praktikan dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan, baik dari sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi.

Melalui pengalaman sistem magang yang pernah dilaksanakan oleh STM Pembangunan dan praktek industri yang kini dilaksanakan oleh sekolah kejuruan, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi sistem magang bukanlah terletak pada konsep, tetapi pada pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan: (a) ketidakseimbangan jumlah peserta didik dengan daya tampung industri, (b) ketidakseimbangan antara jumlah lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja. Jika kita lupa mengkaji dua hal tersebut maka dikhawatirkan bahwa sistem ganda dan sistem magang akan mengalami nasib yang sama dengan yang pernah dilaksanakan oleh STM Pembangunan, kemudian dihentikan,

dan praktek industri yang kini berjalan dapat dikatakan "asal jalan" saja

Temuan Lain

Berdasarkan uraian kedua konsep dan hasil temuan diperoleh makna bahwa: (1) Kepmendikbud No. 0490/U/1992 merupakan bagian karakteristik sistem ganda, (2) kerjasama dalam sistem ganda dapat dilakukan dalam bentuk unit produksi, pengalaman kerja lapangan (PKL), magang bagi guru dan promosi. Dari butir kedua ini, jelas dapat diketahui bahwa unit produksi, PKL, magang dan promosi merupakan subsistem dari sistem ganda. Perolehan ini sebenarnya sesuai dengan Kepmendikbud No. 080/U/1993 Bab IV butir C.1 kurikulum 1994 SMK yang dengan tegas menyatakan bahwa SMK dapat memilih pola penyelenggaraan pengajaran; (a) menggunakan unit produksi sekolah dan beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatihan kejuruan, (b) melaksanakan sebagian kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan di sekolah, dan sebagian lainnya di dunia usaha atau industri, (c) melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Dari perolehan ini dapat dikatakan bahwa perlu diadakan redefinisi dari pengertian sistem ganda sebagaimana diuraikan pada pedoman di atas. Redefinisi perlu dilakukan untuk membedakan pengertian sistem ganda dan sistem magang secara nasional.

Redefinisi

Sebagai upaya redefinisi, Sistem Ganda adalah suatu bentuk kerjasama antara komponen pelaksana pendidikan dengan pihak dunia usaha dan industri terkait atau sejenis dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga kedua program saling terkait membentuk keahlian profesional tertentu. Sedangkan, Sistem Magang merupakan bentuk kegiatan dari sistem ganda untuk mewujudkan kerjasama di antara program pengajaran dengan dunia kerja sebagai realisasi bekerja sambil belajar, agar program pembelajaran di sekolah relevan dan sistematis dalam pembentukan tingkat keahlian profesional tertentu.

Kelihatan bahwa kedua rumusan ini mengandung perbedaan, baik pada makna maupun pada operasionalnya. Perbedaan ini perlu dicermati karena pada suatu lokasi sekolah, yang karena sesuatu hal di daerah itu tidak terdapat dunia usaha dan industri terkait atau sejenis, maka pilihan terhadap alternatif lain harus segera diantisipasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan.

Manfaat Kesepakatan

Untuk mendukung kesepakatan model sertifikasi yang dapat dijadikan acuan nasional dalam pembinaan dan pengembangan tenaga kerja formal maupun nonformal. Sudah selayaknya dengan kekuatan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dunia tenaga kerja Indonesia memiliki Badan Sertifikasi Pembinaan dan Pengembangan tenaga kerja. Mewujudkan badan ini sebenarnya tidak lagi harus dimulai dari awal, karena selama ini sudah ada kesepakatan dan kemitraan yang serasi di antara Depdikbud, Depnaker, dan Departemen Perindustrian. Manfaat Badan ini secara nasional dengan pedoman Pancasila yang kita memiliki, dapat menentukan acuan profil tenaga kerja yang ingin dicapai. Dengan kesamaan kriteria maka pihak industri dan dunia usaha dapat mengadakan pembinaan tenaga kerja secara terpusat dan bersamaan.

Setelah Badan ini terbentuk maka pemikiran untuk pemwujudan undang-undang sistem ganda dan permagangan dapat segera direalisasi. Sebelum merealisasi pemikiran dimaksud maka secara operasional, dari bawah dapat dilakukan upaya awal, yaitu menyusun peta sekolah dan industri serta menyusun mekanisme operasional sistem ganda dan permagangan berdasarkan kondisi 27 provinsi yang ada di Indonesia. Dari hasil yang diperoleh dengan proses kristalisasi dapat disusun Undang-undang Sistem Ganda dan Permagangan yang sangat sesuai dengan perkembangan dunia dan industri yang berkembang di negara kita.

Pengarang

PURNOMO SETIADY AKBAR, Drs, MPd adalah staf pengajar di FPTK IKIP Medan.